



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **STANDLY JUWONO EDWI SUWANDHI**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG**
3. NHK : **675031**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/160 m2 di KAB / KOTA BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA KOTA TOMOHON , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **531.000.000**

1. MOTOR, HONDA NF 125 SD Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOBIL, SUZUKI SWIFT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **42.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **----**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **10.475.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **----**

Sub Total Rp. **2.733.475.000**

III. HUTANG Rp. **975.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **1.758.475.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.